



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 105-112

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat

Muhamad Aprila Aldiansyah<sup>1✉</sup>, Yudi Ferdiana Permana<sup>2</sup>

Universitas Teknologi Digital Bandung

Email: [aprilaldi1122@gmail.com](mailto:aprilaldi1122@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengurusan finansial dusun ialah seluruh aktivitas yang mencakup pemograman, penerapan, penatausahaan, peliputan, serta pertanggungjawaban finansial dusun. Riset ini bermaksud buat mengenali pengurusan finansial desa di Desa Mekarmukti telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun. Tata cara yang dipakai merupakan tata cara kualitatif dengan metode pengumpulan informasi semacam pemantauan, tanya jawab serta pemilihan. Hasil riset ini membuktikan kalau pengurusan finansial dusun di Mekarmukti telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun semacam kejernihan, akuntabilitas serta partisipasi warga meski sedang belum maksimum. Ada pula halangan yang terjalin dalam pengurusan finansial dusun di Desa Kuta Kerangan ialah pangkal energi orang yang sedang lemas serta warga yang belum sepenuhnya yakin pada rezim desa.

Kata Kunci: *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa, Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa*

## Abstract

Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. This study aims to determine whether village financial management in Mekarmukti Village is in accordance with the principles of village financial management. The method used is a qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that village financial management in Mekarmukti is in accordance with the principles of village financial management such as transparency, accountability and community participation although it is still not optimal. The obstacles that occur in village financial management in Kuta Kerangan Village are weak human resources and people who do not fully trust the village government.

Keywords: *Analysis of Village Financial Management, Principles of Village Financial Management*

## PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negeri Republik Indonesia. Membuat pedesaan serupa perihalnya dengan membuat masyarakat senantiasa terletak di Indonesia. Dusun ialah bentuk rezim terkecil yang ada di golongan warga. Manajemen finansial yang bagus, dengan badan serta sokongan yang analitis bisa mendesak daya guna kemampuan pangkal energi orang ialah dengan menggunakan sistem data. Pada bagian finansial ini merupakan bagian berarti dari pembuatan analisa pengurusan finansial di Dusun Mengembang Mukti. Pada pencatatan pengurusan finansial sudah dicoba dengan cara komputerisasi mulai dari kas, pendapatan serta pula pengeluaran. Hendak namun pada cara penyimpanan informasi ataupun arsip informasi sedang kurang apik serta belum terorganisir. Dalam pembangunan di dusun perhitungan yang dipakai tidak sedikit, hingga dari itu penguasa pusat tiap tahunnya membagikan anggaran yang relatif besar pada tiap dusun. Dengan terdapatnya anggaran dusun yang diserahkan oleh penguasa pusat diharapkan penguasa dusun bisa membuat dusun jadi terus menjadi maju. Tidak hanya itu penguasa dusun pula bisa penuh alat serta infrastruktur yang belum terdapat sesuatu dusun. Dengan diterbitkannya Permedagri No 113 Tahun 2014 mengenai Pengurusan Finansial Dusun yang saat ini ditukar jadi Pemendagri No 20 Tahun 2018 selaku alas untuk fitur dusun semacam Kepala Dusun, Sekretaris Dusun, dalam membuat informasi finansial dusun. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 diklaim dalam pengurusan finansial dusun memiliki asas- asas yang wajib diaplikasikan dalam mengatur finansial dusun. Asas- asas itu terdiri dari kejernihan, akuntabilitas dan kesertaan warga. Dengan terdapatnya asas- asas pengurusan finansial penguasa dusun diharapkan dapat mengatur anggaran dusun itu cocok dengan asas- asas serta perhitungan yang sudah diresmikan. Berasal pada kerangka

balik di atas, periset terpikat buat melaksanakan riset hal pengurusan finansial dusun apakah telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun bersumber pada Permendagri No 18 Tahun 2018. Oleh karena itu periset terpikat buat mengutip kasus ini berlaku seperti materi riset objektif dengan kepala karangan "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PADA KANTOR DESA MEKARMUKTI KABUPATEN BANDUNG BARAT".

## METODE PENELITIAN

Pendekatan riset yang dipakai ialah pendekatan riset kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya dengan mendeskripsikan data penelitian sebagai dasar pengolahan hasil penelitian. Ditinjau dari sumber data yang diperoleh penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer. Data primer merupakan data yang melibatkan langsung dengan pihak internal tanpa adanya pelantara. Peneliti mengharapkan pendekatan riset ini sanggup membagikan balasan atas kesimpulan permasalahan yang sudah diawasi.

Dengan tipe riset yang dipakai merupakan tipe riset internal dan eksternal yaitu dengan mencari sumber-sumber data internal langsung dari pihak Bendahara Desa Mekarmukti dan pihak eksternal yaitu masyarakat atau kepada ketua Rukun Warga desa Mekarmukti. Dalam upaya pengumpulan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan dalam riset ini dipakai metode pengumpulan informasi, ialah: observasi atau pemantauan, tanya jawab, serta riset pemilihan. Riset ini memakai tata cara analisa bentuk interaktif. Analisa interaktif terdiri dari 3 ceruk aktivitas yang terjalin dengan cara bersama, ialah pengurangan informasi, penyajian informasi serta pencabutan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sert pertanggung jawaban.

### 1. Perencanaan

Menurut hasil wawancara dengan kaur perencanaan dan hasil observasi di Desa Mekarmukti. Cara pemograman wajib dicoba bersumber pada program, skedul aktivitas yang nyata. Penguasa Dusun Mekarmukti menata program yang dilaksanakan wajib bisa tingkatkan aspek kesehatan, pembelajaran, serta ekonomi warga. pemograman diawali dari musrenbang tingkatan dusun. Pemograman pembangunan Dusun mencakup: RPJMDesa serta RKPDesa.

Dalam menata RPJM Dusun serta RKP Dusun, penguasa Dusun sudah menyelenggarakan konferensi dengan melibatkan warga serta kelembagaan yang terdapat di Dusun. Musrenbang dusun dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt atau Rw serta figur warga selaku perwakilan area buat mengantarkan keinginan yang terdapat di dusun, alhasil esoknya bisa diprioritaskan keinginan warga tiap- tiap area. Cara Perencanaan pembangunan terbuat dalam RKP Dusun( Konsep Aktivitas Pembangunan) sehabis itu dilansir dalam RAB( Konsep Perhitungan Berbelanja) buat kategorisasi APBDes ialah Perhitungan pemasukan serta belanja dusun. APBDes ialah konsep perhitungan finansial tahunan penguasa dusun yang diresmikan buat menyelenggarakan program serta aktivitas yang jadi wewenang dusun.

## 2. Pelaksanaan

Bersumber hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan juga melalui hasil observasi APBDesa Yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Mekarmukti lekas melakukan konsep kegiatan Penguasa Dusun. Buat pendanaan dalam penerapan APBDesa, Penguasa Dusun Mekarmukti melaksanakan pengajuan permohonan distribusi serta pencairan anggaran pada penguasa kabupaten Bandung Barat lewat BPMD. Penerapan pendapatan pemasukan ialah cara menyambut serta menulis pemasukan Dusun. Pangkal pemasukan Dusun Mekarmukti berasal dari: Anggaran Dusun( APBN), Peruntukan Anggaran Dusun( ADD) serta Untuk Hasil Pajak serta Pungutan Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pendapatan pemasukan Dusun Mekarmukti cuma berawal dari pemasukan memindahkan Dusun, pendapatan itu sudah dilaksanakan lewat rekening kas Dusun. Dusun Mekarmukti dikala ini tidak mempunyai pemasukan asli Dusun, sebab minimnya uraian dalam pengurusan kesimpulannya Tubuh Upaya Kepunyaan Dusun( BUMDES) tidak lagi berjalan. Alhasil pemasukan dusun seluruhnya cuma berawal dari pemasukan memindahkan dusun yang difungsikan buat bayaran penyelenggaraan penguasa dusun, pelaksanaan pembangunan dusun, dan pembinaan pemberdayaan warga.

Tabel 1. Penadapatan Dana Desa Tahun 2022

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
Pendapatan asli Desa	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
Pendapatan transfer	3.301.421.200,00	3.279.441.795,00	21.979.405,00
Dana Desa	1.922.820.000,00	1.922.820.000,00	0,00
Bagi hasil pajak dan retribusi	253.170.400,00	236.026.200,00	17.144.200,00
Alokasi dana Desa	720.430.800,00	715.595.595,00	4.835.205,00

Bantuan keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan keuangan Kabupaten/Kota	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
Pendapatan lain lain	0,00	1.698.250,00	1.698.250,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.323.021.200,00	3.281.140.045,00	41.881.155,00

Sumber data langsung dari Bendahara Desa Mekarmukti

Pemasukan memindahkan Dusun( APBN) Dusun Mekarmukti seluruhnya dialokasikan buat aktivitas pembangunan raga. Pemasukan memindahkan berasal dari ADD dialokasikan buat penyelenggaraan penguasa, pemberdayaan warga, serta pembinaan warga. Sebaliknya pemasukan dari hasil pajak serta pungutan wilayah dialokasikan buat pembangunan serta pembinaan masyarakat desa.

### 3. Penatausahaan

Bersumber hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan dan juga hasil dari observasi Beliau berkata Penatausahaan pengeluaran di Dusun Mekarmukti dilaksanakan oleh Bendaharawan Dusun. Dalam pencatatan pengeluaran, Bendaharawan dusun menggunakan Novel Pembantu Bank, serta Novel Kas Biasa. Seluruh pengeluaran atau berbelanja dusun yang dicoba Dusun Mekarmukti bertabiat kas. Pengeluaran atau berbelanja dusun yang dikeluarkan oleh bendaharawan dusun sudah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penatausahaan terpaut berbelanja dusun, sudah dicoba pengumpulan berbentuk fakta ciri dapat ataupun catatan serta dicatat pada novel kas Biasa. Bendaharawan Dusun pula menulis peranan perpajakan yang dipotong atau dipungut atas bisnis pengeluaran dicoba ke dalam novel pembantu pajak.

Logistik benda ataupun pelayanan dicoba lewat swakelola dengan memberdayakan daya pakar yang terdapat di dusun, serta mengoptimalkan pemakaian material ataupun materi dari area setempat. Swakelola itu bermaksud buat memberdayakan warga setempat serta buat mendesak kenaikan aktivitas ekonomi lokal dusun. Anggaran yang berasal dari ADD serta untuk hasil pajak serta pungutan wilayah( APBD) dilaksanakan langsung oleh penguasa dusun yang diserahkan kewewenangan ialah, kas biasa atas eksekutif itu, buat anggaran yang berasal dari anggaran Dusun( APBN) dilaksanakan oleh Regu Pengelola Finansial( TPK). TPK terdiri dari faktor Rezim Dusun serta faktor warga Dusun. Pembentukan TPK lewat pesan ketetapan( SK) Kepala Dusun. TPK dibangun buat melakukan program aktivitas yang berasal dari anggaran dusun( APBN). Sehabis TPK dibangun serta APBDesa sudah diresmikan hingga tahap dini yang dicoba TPK Dusun Mekarmukti ialah membuat

RAB selaku salah satu akta pengajuan pendanaan. Sehabis RAB terbuat, berikutnya dicoba konfirmasi oleh Kepala Dusun, sehabis dicoba konfirmasi, RAB disetujui oleh Kepala Dusun serta TPK melaksanakan cara aktivitas cocok dengan RAB itu.

#### 4. Pelaporan

Bendaharawan Dusun Mekarmukti melaksanakan tutup novel serta membuat informasi pertanggungjawaban tiap akhir bulan, informasi pertanggungjawaban terbuat dalam wujud Pesan Pertanggungjawaban( SPJ), SPJ ini tercantum selaku persyaratan buat distribusi anggaran dusun, ADD, serta untuk hasil pajak&amp; pungutan Wilayah.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi penerapan APBDesa yang terdiri dari pemasukan, berbelanja serta pembiayaan hendak di informasikan oleh kepala dusun pada Bupati atau Walikota tiap akhir tahun perhitungan. Informasi pertanggungjawaban realisasi APBDesa diresmikan dengan Peraturan Dusun. Informasi realisasi serta informasi pertanggungjawaban realisasi penerapan APBDesa diinformasikan pada warga dengan cara tercatat serta dengan alat data yang gampang diakses oleh warga, semacam kediaman pemberitahuan, radio komunitas, serta alat data yang lain. Informasi realisasi serta informasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa di informasikan pada Bupati atau Walikota lewat camat sangat lelet 1( satu) bulan sehabis akhir tahun perhitungan bertepatan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Bendahara Desa lalu melaporkannya pada Kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat selalu secara transparan mengenai pendapatan desa, alokasi dananya untuk apa, selalu dijelaskan secara detail kepada seluruh masyarakat Desa Mekarmukti, bahkan selalu dipang-pang didepan kantor Desa Mekarmukti mengenai pendapatan dan pengeluaran dan pengelolaan keuanagn desanya.

#### Pembahasan Penelitian

Berdasarkan berita yang beredar mengenai masalah pengelolaan keuangan Desa Mekarmukti yang menurut isu yang beredar di masyarakat Desa Mekarmukti yang dimana menurut masyarakat dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan bahkan alokasi dana kepada tiap rukunarganya tidak dijelaskan, dan bahkan adanya hambatan dalam pengelolaan keuangannya. Alhasil peneliti melakukan penelitian terkait isu yang beredar tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak internal yaitu pada pihak Desa tepatnya langsung mewawancarai Bendahara Desa dan Sekertaris Desa dengan hasil ternyata isu yang beredar dimasyarakat tersebut itu hoaks atau salah, karena pada kenyataannya

pemerintah Desa Mekarmukti sangat terbuka perihal pengelolaan keuangannya dan bahkan dalam pengelolaan keuangannya sudah sangat sesuai dengan peraturan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam segi Transparansi pemerintah Desa selalu terbuka mengenai pendapatan, pengeluaran dan pengelolaan keuangan Desa kepada setiap warganya selalu diinformasikan. Dalam segi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya selalu dilaporkan sedetailnya kepada seluruh masyarakat. Dalam segi partisipasi dalam pendapatan pengeluaran dan pengelolaan selalu diadakan rapat dengan pihak Rt, Rw, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat guna untuk mendengarkan aspirasi dari setiap wilayah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak ketua Rukun Warga ( RW ) di Desa Mekarmukti dan melakukan observasi dengan hasil bahwa di Desa Mekarmukti dalam hal pengelolaan keuangannya sangatlah bagus karna di setiap wilayah Rukun Warga tiap tahunnya selalu ada progres pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan bahkan selalu berkoordinasi baik dengan pihak desa mengenai kebutuhan wilayahnya apa dan langsung diadakannya rapat dengan para pimpinan Rukun Warga, tokoh masyarakat dan dengan Pihak Desa. Walaupun dana untuk setiap rukun warganya setiap tahun itu tidak pasti karena tiap pembangunan tiap tahun tiap Rukun Warga. Misalkan tahun ini pembangunan di Rw 1 dan tahun depan pembangunan di Rw 2 begitupun seterusnya. Tetapi setiap bulan dana Desa Mekarmukti selalu memberi insentif pada setiap Guru Ngaji dan kepada ketua Rukun Warga ( RW ) dan ketua Rukun Tetangga ( RT ).

## SIMPULAN

Bersumber pada hasil riset yang sudah dilaksanakan didapat kesimpulan kalau:

1. Dalam mengatur finansial dusun penguasa dusun Mekarmukti telah berjalan dengan bagus tetapi belum maksimum. Pada dasar kejernihan serta kesertaan warga pada Mekarmukti telah berjalan dengan maksimum sebaliknya pada dasar akuntabilitas telah maksimum sebab fitur dusun selengkapya membagikan pertanggungjawaban pada warga melalui para ketua Rukun Warga dan para tokoh Masyarakat melalui adanya musyawarah.
2. Faktor- faktor penghalang dalam pengurusan finansial dusun. Dalam mengatur finansial dusun penguasa dusun kerap hadapi hambatan, semacam lemahnya pangkal energi orang dusun Mekarmukti dan Keyakinan yang kurang dari warga setempat.
3. Namun hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa tidak ditemukan hambatan

karena semua dikelola dengan baik oleh Desanya sesuai peraturan Kemendagri No 20 tahun 2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harlianto, Didit, (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Makalalag, dkk, (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Sam Ratulangi
- Mariana Levi, (2020). *Analisis pengelolaan keuangan desa di desa kuta karangan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2020*. Fakultas ilmu social dan politik Universitas Medan Area
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.